



Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPLITBANGDA) Kabupaten Maluku Tengah

Mauliyanti Talaohu^{1*}, Normawati¹, Josef A. Ufie¹

¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Corresponding author email: mauliyantitaloahunpatti@mail.com

Article Info

Article history:

Received 29 November, 2024

Approved December 26, 2024

Keywords:

Evaluasi, Pelaksanaan Program, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

This study also aims to identify factors that hinder program implementation, such as policies, human resources, and organizational capacity, and evaluate their impact on program success. The method used in answering the research objectives above is qualitative with a phenomenological descriptive approach with Indepth Interview data collection technique this technique is carried out using an interview guide (Indepth Guide). The results prove that community participation is low due to lack of socialization, poor infrastructure, dependence on the traditional sector, difficult economic conditions, irrelevant training, and lack of access to capital and financial training, Sustainability is hampered by limited infrastructure, difficult access to financing, limited training, lack of innovation, and social and cultural challenges that hinder the acceptance of this sector. The assessment shows the program is less effective due to: lack of socialization and local engagement, limited infrastructure, inappropriate training, difficult access to finance, dependence on traditional sectors, resistance to change, and lack of monitoring, evaluation, and inter-agency coordination.

ABSTRAK

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program, seperti kebijakan, sumber daya manusia, dan kapasitas organisasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesuksesan program. Metode yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian di atas adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis dengan Teknik pengumpulan data *Indepth Interview* teknik ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*Indepth Guide*). Hasil penelitian membuktikan yaitu partisipasi masyarakat rendah karena minimnya sosialisasi, infrastruktur yang buruk, ketergantungan pada sektor tradisional, kondisi ekonomi yang sulit, pelatihan yang tidak relevan, dan kurangnya akses modal serta pelatihan keuangan, Keberlanjutan terhambat oleh infrastruktur yang terbatas, akses pembiayaan sulit, keterbatasan pelatihan, kurangnya inovasi, dan tantangan sosial serta budaya yang menghambat penerimaan sektor ini. Penilaian menunjukkan program kurang efektif karena: kurangnya sosialisasi dan keterlibatan lokal, infrastruktur terbatas, pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar, akses pembiayaan sulit, ketergantungan pada sektor tradisional, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya pengawasan, evaluasi, dan koordinasi antar lembaga.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Talaohu, M., Normawati., & Ufie, J. A. (2024) Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPLITBANGDA) Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2745-2759. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3618>

PENDAHULUAN

Era globalisasi dengan perubahan yang sangat cepat ini, kebijakan ekonomi kreatif dapat menjadi strategi tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi, seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penurunan industri tradisional. Hal ini dikarenakan sektor kreatif sering kali lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dengan lebih baik. Menurut Cahyani Muis (2019:2), Ekonomi kreatif terlahir dari kreativitas para masyarakat, yang dimana mampu membangun ketrampilan sebagai modal utama dalam menciptakan barang dan jasa agar memiliki nilai ekonomi. Ketrampilan masyarakat didukung dengan karakteristik budaya, sumber daya alam, bahkan geografis sebagai ciri khas dari tempat tinggal masyarakat tersebut. Kemudian oleh Kementrian Perdagangan, dalam Basri dkk. (2012), ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru yang mengintenskan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, yang oleh Moelyono (2010), dikenal sebagai ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan pada masa depan. Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam Sulistiyani, (2009), menjelaskan bahwa : *Evaluation refer to act or process to determining the vulue the something*. Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai. Kemudian oleh Arikunto (2007), Evaluasi dikatakan sebagai proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta memperlakukan suatu penelitian.

Sedangkan Wiratman (2021), selanjutnya mendefinisikan evaluasi program sebagai metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Sependapat dengan Wirawan, Tayibnaxis (2008), melihat evaluasi program sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Adapun pendapat lainnya menegaskan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi secara sistematis tentang bagaimana program tersebut berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminati. Kemudian Suhartono (2014), mengartikan Evaluasi program sebagai proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Ekonomi kreatif berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan kreatif. Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani koikonomia, yang merupakan turunan dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti mengatur. Arti asli dari oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Namun, seiring perkembangan ekonomi, arti tersebut berkembang menjadi suatu ilmu yang terstruktur secara sistematis dalam rangka mengatur rumah tangga. Di

sini, "rumah tangga" tidak hanya merujuk pada makna harfiah, melainkan mencakup kelompok sosial yang dianggap sebagai "rumah tangga", seperti perusahaan, kota, bahkan negara., Ritonga (2000). Ekonomi kreatif oleh Pangestu (2008:1) dikatakan sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kreativitas, yang dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Pesan yang besar ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas yaitu ide, talenta dan kreativitas.

Pada tahun 2001, konsep ekonomi kreatif diperkenalkan oleh John Howkins melalui bukunya yang berjudul "Creative Economy: How People Make Money from Ideas". Dalam bukunya tersebut, Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menempatkan kreativitas, warisan budaya, dan lingkungan sebagai fokus utama untuk masa depan. Proses nilai tambah dalam ekonomi kreatif tergantung pada kreativitas, keanekaragaman, dan lingkungan, yang memberikan nilai tambah pada perekonomian. Secara sederhana, produktivitas dalam ekonomi kreatif berasal dari individu kreatif yang menggunakan pengetahuan mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dengan nilai komersial, dalam Ginting dkk. (2017). Ekonomi kreatif memiliki enam ciri utama yaitu : a. Adanya kreasi, intelektual Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangatlah dibutuhkan dan itu menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif. b. Mudah diganti, Kreasi dan inovasi harus dikembangkan sesuai dengan bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi. Sehingga bertujuan agar bisa di terima oleh konsumen dan bermanfaat bagi para konsumen. c. Distribusi secara langsung dan tidak langsung, Dengan adanya distribusi langsung dan tidak langsung itu berdasarkan pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan para konsumen. d. Membutuhkan kerja sama, Dalam industri kreatif, kerja sama sangatlah penting. Misalnya antara pihak pengusaha dengan pemerintah yang mengatur sebuah kebijakannya. e. Berbasis pada ide, Yang artinya ide merupakan hal yang utama dan harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Ide sangatlah penting dalam mengembangkan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. f. Tidak memiliki batasan, Maksud dari tidak memiliki batasan ini adalah tidak ada batasan dalam penciptaan sebuah produk. Yang artinya inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk akan selalu terjadi dan hal ini tidak memiliki batasan yang pasti.

Keberhasilan eksploitasi ide kreatif tersebut yang menghasilkan daya jual akan diperoleh kemampuan untuk meningkatkan perekonomian baik secara skala kecil (perorangan maupun kelompok) hingga skala besar (wilayah atau bahkan suatu negara). Dengan konsep ekonomi kreatif yang merupakan sebuah konsep yang masih tergolong baru maka secara umum tujuan utama dari ekonomi kreatif adalah: a. Peningkatan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto b. Meningkatkan nilai ekspor c. Menambah penyerapan tenaga kerja yang didukung dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru d. Bertambahnya jumlah perusahaan yang kompetitif terutama di bidang ekonomi kreatif e. Penggunaan sumber daya alam yang lebih terarah dengan tujuan untuk pemanfaatan generasi selanjutnya f. Penciptaan dari nilai ekonomi yang bersumber dari ide-ide dan inovasi dengan memanfaatkan kearifan dan budaya lokal g. Memaksimalkan area pergerakan ekonomi keseluruhan bagian (plosok) h. Memberikan dan memperkuat branding terhadap produk lokal ataupun warisan suatu generasi. (Dalam Tiara Evarista, Tujuan Dan 7

Pengertian Ekonomi Kreatif Menurut Para Ahli, Di Akses Dari <https://Mridn.Com/Inilah-Tujuan-Dan-7-Pengertian-Ekonomi-Kreatif-Menurut-Para-Ahli/> Pada 29 Mei 2024 Pukul 10.00).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak secara umum adalah suatu pengaruh kuat yang menimbulkan suatu akibat baik itu secara positif ataupun secara negatif, dalam (<https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses tgl 08 Mei 2024), Jadi dapat dikatakan bahwa dampak pada konteks ekonomi kreatif ini merupakan dampak yang diakibatkan oleh adanya ekonomi kreatif baik itu dari sudut pandang positif atau negatif. Menurut Alfian dampak industri kreatif atau industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat atau ditinjau dari : a. Dilihat dari sudut ekonomi, keberhasilan kegiatan industri akan menghasilkan perubahan yang berarti dalam struktur perekonomian masyarakat. b. Dilihat dari bidang sosial, diprediksi industri akan menghasilkan perubahan struktur sosial dimana sebagian besar di masyarakat akan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri. c. Dilihat dari segi budaya, industri akan menghasilkan perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (life style pattern) masyarakat. Nawawi (2019). Sedangkan berdasarkan hasil temuan Wance, dkk (2020), penyelenggaraan pemerintah dalam Pembangunan (Wance, Muhtar, Kaliky, 2020), perubahan paradigma administrasi (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), pemanfaatan teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), pemberdayaan Masyarakat (Suhu, Wance, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari beberapa dampak positif yang terjadi seperti: a. Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) b. Penyerapan tenaga kerja c. Peningkatan produksi d. Peningkatan pendapatan masyarakat Dan dari penjelasan diatas juga memungkinkan muncul dampak negatif yang terjadi seperti Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial. Seseorang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat guna dapat membentuk tujuan mereka sendiri dengan metode dan hasil berdasar pada tingkat kesadaran masyarakat, yang mana sebagai kunci suatu pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan untuk perubahan, pemberdayaan melibatkan akses ke sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersebut secara efektif, proses pemberdayaan yang dinamis, sinergis, berkembang, serta selalu memiliki solusi yang berbeda, Eka Putra (2007). Tugas pokok salah satu pada Baplitbangda Kabupaten Maluku Tengah yakni Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan adalah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang berfungsi : (1). Menghimpun dan melaksanakan peraturan per undang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas. (2). Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan. (3). Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. (4). Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). (5). Melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah).

Salah satu program pokok di bidang ini adalah mengkoordinir kegiatan pemberdayaan untuk penguatan ekonomi masyarakat guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi masyarakat di daerah, termasuk dalam

program pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat dengan SKPD lain dalam lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun telah ada upaya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif di masyarakat, namun belum ada evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas dampak program tersebut. Beberapa gejala ketidakberhasilan yang teridentifikasi pada fokus bantuan adalah sebagai berikut : (1) Tingkat Partisipasi Rendah: Terlihat kurangnya minat atau partisipasi dari masyarakat di wilayah ini untuk meminta bantuan pada Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah. Ini menunjukkan bahwa strategi atau pendekatan yang digunakan belum berhasil menarik perhatian atau dukungan yang diperlukan. (2) Keterbatasan Akses dan Sumber Daya: Pelaku ekonomi kreatif menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti modal, pelatihan, atau infrastruktur. Hal ini menandakan bahwa program belum berhasil menyediakan dukungan yang memadai. (3) Tidak Adanya Dampak Positif yang Signifikan : Belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi dari kelompok masyarakat setempat dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yang telah ada selama ini. Ini mengindikasikan bahwa program belum berhasil mencapai tujuannya. (4) Rendahnya Kualitas Produk atau Layanan: Produk atau layanan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif tidak berkualitas atau tidak memenuhi standar pasar. Hal ini menunjukkan bahwa program belum berhasil mendukung pengembangan kreativitas atau keahlian yang diperlukan. (5) Tidak Ada Penilaian dan Penyesuaian yang Dilakukan: Tidak dilakukan evaluasi rutin dan menyeluruh terhadap program, serta tidak ada tindakan perbaikan atau penyesuaian yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Program terindikasi belum berhasil mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaannya karena masih bersifat Project Oriented.

Oleh karena itu, penelitian evaluasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kreatif oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan, serta menjadi sumbangan bagi pemahaman teoritis dan praktis dalam konteks pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah pedesaan. Adapun definisi operasional pada pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kreatif oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah: (1). Kemampuan mengatur (Merencanakan, membagi sumber bantuan, menggerakkan, mengawasi, mengevaluasi) program bantuan pemberdayaan ekonomi kreatif pada masyarakat sesuai data dan fakta dalam setiap tahun. (2). Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam program. (3). Tingkat keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif setempat. (4). Penilaian dari pihak terkait (stakeholders) terhadap efektivitas pelaksanaan program. Adapun faktor pendukung yaitu (1). Kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif. (2). Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. (3). Ketersediaan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan proyek. (4). Kemitraan dengan lembaga atau komunitas lokal untuk mendukung program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat monovariat fenomenologis yang bertujuan untuk secara mendalam mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kreatif yang di koordinir oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi kondisi pelaksanaan, kendala, dan potensi yang terkait dengan implementasi program ini. Penelitian ini berlokasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Maluku Tengah, dengan durasi waktu

penelitian selama tiga bulan dengan Informan penelitian yang dibutuhkan dan kebutuhan informasi yang relevan dengan evaluasi program pemberdayaan ekonomi kreatif oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah: 1) Kepala Badan dan Pegawai pada Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan. 2) Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Menangani Program Pemberdayaan. 3) Kepala Dinas Perikanan dan Pegawai Dinas yang Menangani Program Pemberdayaan. 4) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Pegawai Dinas yang Menangani Program Pemberdayaan. 5) Para Ketua Kelompok Usaha dari Program Tagalaya Siputri, Beta Maluku Tengah, Belang Palka, Paman, Hasrat, dan Bang Calo. 6) Akademisi dan Pemerhati Program Pemberdayaan Masyarakat. Data-data penelitian dari lapangan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) mencakup 6 komponen, yaitu : Reduksi data, sajian data, verifikasi data, melakukan triangulasi, Member cek, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah

Kemampuan dalam mengatur program pemberdayaan ekonomi kreatif, yang mencakup kegiatan merencanakan, membagi sumber bantuan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program, adalah salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dalam setiap tahun, berikut adalah gambaran mengenai kemampuan mengatur Bappelitbangda dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif pada masyarakat, dapat dijelaskan melalui hasil wawancara sebagai berikut :

Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah pada kesempatan lain menjelaskan bahwa :

Bappelitbangda melakukan pemetaan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk merancang program pemberdayaan ekonomi kreatif yang tepat. Pemetaan ini mencakup identifikasi sumber daya alam (pertanian, perikanan, hutan, kerajinan tangan) untuk menentukan sektor yang dapat dikembangkan, seperti kerajinan, kuliner, atau pariwisata. Selain itu, pemahaman terhadap keterampilan dan pendidikan masyarakat, seperti keterampilan menjahit atau pertanian organik, membantu menentukan program pelatihan yang sesuai. Infrastruktur yang ada, seperti jalan, pasar, dan akses internet, juga mempengaruhi pemasaran produk dan pengembangan usaha.. (Wawancara, 13 September 2024). Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah bahwa:

"Analisis kondisi sosial-ekonomi penting, termasuk pemetaan tingkat pendapatan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Ini membantu menentukan kelompok yang membutuhkan bantuan modal, pelatihan, atau akses pasar. Pemahaman tentang sektor unggulan di daerah, seperti pertanian, pariwisata, atau perikanan, juga memandu pengembangan program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan keterampilan atau industri kreatif berbasis produk lokal." (Wawancara, 13 September 2024).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah juga menjelaskan bahwa: Program pemberdayaan ekonomi kreatif bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perkotaan dan pedesaan, dengan fokus pada sektor potensial seperti kerajinan tangan, tata boga, dan kuliner. Program ini juga berusaha memperluas pasar

produk-produk tersebut, dengan memanfaatkan kawasan wisata pantai di Desa Ina Marina, Kota Masohi, sebagai pusat pameran dan penjualan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. (Wawancara, 17 Oktober 2024). Dikatakan pula oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

“Pemetaan ekonomi akan digunakan untuk menyusun rencana aksi yang terperinci, dengan sasaran jelas seperti peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran. Rencana ini juga mencakup indikator kinerja dan strategi implementasi yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, pemetaan kebutuhan ekonomi harus bersifat dinamis dan berbasis masukan masyarakat melalui diskusi dan musyawarah untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.” (Wawancara, 20 September 2024).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Maluku Tengah bahwa:

“Pembagian bantuan yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bantuan, baik materi, pelatihan, atau pendampingan, dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Distribusi dilakukan melalui jaringan lokal seperti kelompok usaha dan pemerintah desa. Menggerakkan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan, sehingga Bappelitbangda melibatkan mereka melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan langsung. Selain bantuan materi, pelatihan keterampilan diberikan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri, termasuk keterampilan teknis dan manajemen bisnis. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan, dengan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan kesesuaian program, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.” (Wawancara, 13 September 2024).

Indikator kemampuan dalam mengatur program pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek kunci yang mencakup perencanaan, pembagian sumber bantuan, penggerakan masyarakat, pengawasan, dan evaluasi.

- 1) Bappelitbangda melakukan pemetaan ekonomi masyarakat yang mencakup identifikasi sumber daya alam, keterampilan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini membantu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan pariwisata.
- 2) Distribusi bantuan dilakukan melalui jaringan lokal, seperti kelompok usaha dan pemerintah desa, untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan program. .
- 3) Partisipasi aktif masyarakat dijadikan prioritas melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan langsung. Bappelitbangda berusaha menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program, dengan memberikan pelatihan keterampilan yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kemampuan dalam mengelola bisnis secara mandiri dan berkelanjutan.
- 4) Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kemajuan dan kesesuaian program dengan sasaran. Pengawasan juga mencakup audit penggunaan dana dan verifikasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kemampuan Bappelitbangda dalam mengatur program pemberdayaan ekonomi kreatif tercermin dalam penerapan perencanaan yang berbasis data, distribusi bantuan yang tepat sasaran, penggerakan masyarakat melalui partisipasi aktif, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat lokal dalam program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Partisipasi masyarakat lokal dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah yang tergolong kurang hal ini disebabkan oleh beberapa faktor spesifik yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjelaskan rendahnya tingkat partisipasi tersebut, berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan budaya setempat: Menurut Kepala Dinas Perikanan dan beberapa orang Pegawainya yang Menangani Program Pemberdayaan dibidang ini, Menyatakan bahwa :

“Masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program ini, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang tidak tepat. Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan buruk, akses internet terbatas, dan pasar yang belum optimal, juga menjadi kendala. Selain itu, rendahnya keterampilan masyarakat dan keterbatasan modal usaha menghambat partisipasi mereka dalam sektor ekonomi kreatif.” (Wawancara, 20 September 2024).

Bapak A. Tehuwayo, Salah serorang Ketua Kelompok Usaha dari Program Tagalaya Siputri, Desa Tehua mengatakan bahwa :

“Ketergantungan pada sektor tradisional dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah mengurangi partisipasi masyarakat. Ketidakpercayaan ini timbul akibat pengalaman buruk dengan program pemerintah sebelumnya dan pandangan bahwa usaha ekonomi kreatif tidak menjanjikan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada mengikuti program pemberdayaan.” (Wawancara, 30 Agustus 2024).

Bapak Buce Thomas (56 Tahun) Salah Seorang Ketua Kelompok usaha dari gugus usaha Beta Maluku Tengah, mengatakan bahwa :

“Sosialisasi yang tidak melibatkan masyarakat lokal aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan budaya lokal, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan dalam keterampilan teknis, pengelolaan usaha, dan pemasaran produk. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan dan internet, serta tidak memanfaatkan lokasi strategis atau pasar digital untuk memperluas pasar produk lokal. Keterbatasan akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan, serta kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan.” (Wawancara, 12 Oktober 2024).

Partisipasi masyarakat lokal dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah tergolong rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program pemberdayaan, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang tidak tepat. 2) Kondisi infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak, akses internet terbatas, dan pasar yang belum optimal, menghambat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif. 3) Banyak masyarakat masih bergantung pada sektor tradisional dan merasa bahwa usaha ekonomi kreatif tidak menjanjikan, ditambah dengan kurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah sebelumnya. 4) Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan, daripada mengikuti program pemberdayaan. 5) Program pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan budaya lokal, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan dalam keterampilan teknis, pengelolaan usaha, dan pemasaran produk, juga menjadi kendala. 6) Kurangnya akses ke modal usaha dan pembiayaan yang ramah untuk pelaku usaha kecil di pedesaan, serta kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan, menghambat partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif.

Tingkat keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif setempat.

Keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah kurang berhasil dikarenakan beberapa faktor yang saling terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait serta pengamatan terhadap kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur di daerah tersebut, berikut adalah beberapa faktor penyebab utama. Seperti dikatakan oleh Bapak Albert Wattimena (67 Tahun), salah seorang Ketua Kelompok Usaha Belang Palka, Negeri Amahai, Beliau mengatakan bahwa:

“Akses transportasi yang buruk di wilayah pesisir dan pedesaan serta keterbatasan akses internet menghambat distribusi produk dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. Hal ini membatasi kemampuan produk lokal untuk dijangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses modal usaha. Program pembiayaan yang ada seringkali tidak mencakup wilayah terpencil atau memiliki persyaratan ketat, menghambat pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha, membeli bahan baku, atau memperluas pasar produk mereka.” (Wawancara, 13 September 2024).

Begitu pula dengan Bapak Buce Thomas (56 Tahun) Salah Seorang Ketua Kelompok usaha dari gugus usaha Beta Maluku Tengah, beliau mengatakan bahwa :

“ Kurangnya akses pembiayaan dan modal menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor ekonomi kreatif. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan modal karena program pembiayaan yang ada seringkali memiliki syarat ketat dan tidak menjangkau wilayah pedesaan. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas juga menghambat pengelolaan usaha. Program pelatihan yang ada sering kali tidak relevan dengan kebutuhan pasar atau budaya lokal, sehingga masyarakat kesulitan bersaing dan mengembangkan produk yang berkualitas.” (Wawancara, 12 Oktober 2024).

Keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah terhambat oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Pertama, keterbatasan infrastruktur, terutama akses transportasi yang buruk di wilayah pesisir dan pedesaan serta akses internet yang terbatas, menyulitkan distribusi produk dan pemanfaatan pemasaran digital. Kedua, kurangnya akses pembiayaan yang memadai bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan program yang sering kali tidak menjangkau wilayah terpencil atau memiliki persyaratan yang ketat. Selain itu, keterbatasan keterampilan dan pelatihan yang tidak relevan menjadi masalah besar, dengan pelatihan yang lebih fokus pada keterampilan teknis tanpa memperhatikan manajerial atau pemasaran, yang sangat diperlukan untuk keberhasilan usaha. Ketergantungan pada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan serta kurangnya inovasi dalam diversifikasi produk juga menghambat perkembangan sektor ekonomi kreatif, ditambah dengan tantangan sosial dan budaya, di mana sebagian masyarakat menolak sektor ini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Semua faktor ini mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Penilaian dari pihak terkait (stakeholders) terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Penilaian dari pihak terkait (stakeholders) terhadap kurang efektifnya pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan beberapa isu dan tantangan yang menjadi hambatan utama dalam implementasi program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kelompok usaha lokal, dan masyarakat, berikut adalah beberapa aspek yang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut: - Kurangnya Sosialisasi dan Keterlibatan Stakeholders Lokal - Keterbatasan Infrastruktur - Ketidaccocokan Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar- Akses Terbatas ke Pembiayaan - Ketergantungan pada

Sektor Tradisional dan Resistensi terhadap Perubahan - Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Program - Kurangnya Dukungan dan Koordinasi Antar lembaga.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, meskipun potensi SDM di daerah ini cukup besar, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan yang relevan dan terlatih sesuai dengan kebutuhan industri ekonomi kreatif yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan kondisi SDM di Kabupaten Maluku Tengah dalam konteks ekonomi kreatif: Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

“Keterbatasan keterampilan teknis merupakan hambatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah. Pelatihan yang ada sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kurang fokus pada keterampilan teknis seperti desain produk, kerajinan tangan, seni rupa, atau kuliner, dan tidak berkelanjutan. Selain itu, pelatihan yang diberikan tidak selalu relevan dengan permintaan pasar atau tren global, sehingga pelaku usaha kesulitan bersaing. Tingkat pendidikan yang relatif rendah, terutama di daerah pedesaan, juga membatasi pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi kreatif yang lebih kompleks. Keterbatasan akses ke pendidikan kejuruan atau vokasi yang relevan dengan sektor ini semakin memperburuk masalah, karena fasilitas pendidikan vokasi di bidang seni, desain, kuliner, dan teknologi digital sangat terbatas.” (Wawancara, 13 September 2024).

Dikatakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

“Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki keterampilan tradisional yang berpotensi menjadi produk ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, musik, tarian, dan kuliner khas. Namun, kurangnya inovasi dan pengembangan produk membuat potensi ini sulit untuk berkembang. Banyak pelatihan yang diberikan bersifat satu kali tanpa tindak lanjut, sehingga pelaku usaha kesulitan menerapkan keterampilan yang dipelajari. Selain itu, kurangnya pelatihan dalam teknologi digital, pemasaran online, dan desain produk modern membatasi kemampuan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.” (Wawancara, 20 September 2024).

Bapak A. Tehuwayo, Salah seorang Ketua Kelompok Usaha dari Program Tagalaya Siputri, Desa Tehua menjelaskan bahwa :

“Selain Banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi kesulitan dalam pengelolaan bisnis, seperti keuangan, perencanaan, dan pemasaran, yang menghambat keberlanjutan usaha mereka. Tanpa manajer yang berkompeten dalam bidang ini, banyak usaha yang stagnan atau gagal. Selain itu, kurangnya riset pasar dan pemahaman tren industri membuat produk lokal sulit bersaing di pasar global. Kualitas produk juga tidak konsisten karena keterbatasan keterampilan teknis. Keterbatasan akses ke teknologi dan internet menghambat pemasaran digital, yang sangat penting di era digital ini. Pengenalan teknologi dalam produksi dan pemasaran bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.” (Wawancara, 30 Agustus 2024).

Banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi kesulitan dalam pengelolaan bisnis, seperti keuangan, perencanaan, dan pemasaran, yang menghambat keberlanjutan usaha mereka. Tanpa manajer yang berkompeten dalam bidang ini, banyak usaha yang stagnan atau gagal. Selain itu, kurangnya riset pasar dan pemahaman tren industri membuat produk lokal sulit bersaing di pasar global. Kualitas produk juga tidak konsisten karena keterbatasan keterampilan teknis. Keterbatasan akses ke teknologi dan internet

menghambat pemasaran digital, yang sangat penting di era digital ini. Pengenalan teknologi dalam produksi dan pemasaran bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.

Ketersediaan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan proyek.

Ketersediaan dana dan bantuan teknis merupakan dua faktor yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, sektor ini menghadapi berbagai kekurangan yang menghambat pertumbuhannya, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada ekonomi kreatif. Kekurangan dalam kedua aspek ini sangat mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan proyek-proyek ekonomi kreatif yang ada di daerah tersebut. Dikatakan oleh Bapak Albert Wattimena (67 Tahun), salah seorang Ketua Kelompok Usaha Belang Palka, Negeri Amahai, bahwa:

“Banyak Pelaku usaha di Kabupaten Maluku Tengah, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, kesulitan mengakses pembiayaan karena persyaratan ketat dari lembaga keuangan dan kurangnya jaminan. Program bantuan pemerintah sering memiliki mekanisme rumit dan tidak sesuai dengan kapasitas usaha kecil. Dana yang tersedia terbatas, hanya cukup untuk pengadaan peralatan dasar atau biaya operasional, tanpa mendukung pengembangan pasar atau peningkatan kualitas produk. Selain itu, pendanaan lebih fokus pada proyek jangka pendek, tanpa mendukung pengembangan berkelanjutan seperti manajemen usaha, riset pasar, atau inovasi produk.” Wawancara, 13 September 2024).

Dielaskan oleh Bapak S.Talahatu (55 Tahun), salah seorang Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maluku Tengah, yang Mengatakan bahwa :

“Program pendanaan saat ini lebih fokus pada pengembangan produk yang sudah ada, seperti kerajinan tangan atau produk budaya tradisional, tanpa memberikan peluang bagi inovasi produk baru yang sesuai dengan tren pasar modern. Kekurangan dukungan dana untuk riset dan pengembangan (R&D) membuat produk lokal kesulitan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Program pelatihan yang ada sering kali hanya mengajarkan keterampilan teknis, seperti pembuatan kerajinan atau produk kuliner, tanpa mencakup aspek penting lainnya seperti pemasaran, branding, manajemen usaha, dan penggunaan teknologi digital. Pelatihan ini juga cenderung tidak berkelanjutan dan tidak efektif, sehingga peserta tidak memperoleh pengalaman atau keterampilan praktis yang dapat diterapkan. Banyak pelaku usaha yang kekurangan pengalaman dalam manajemen usaha dan kesulitan meningkatkan kapasitas mereka, sehingga usaha mereka terbatas pada produksi tanpa perencanaan pertumbuhan atau ekspansi yang matang.” (Wawancara, 1 November 2024).

Bapak A. Tehuwayo, Salah seorang Ketua Kelompok Usaha dari Program Tagalaya Siputri, Desa Tehua mengatakan bahwa :

“Banyak pelaku usaha kesulitan mengakses bantuan dana atau pembiayaan karena prosedur yang rumit dan persyaratan administratif tinggi, seperti laporan keuangan rinci atau jaminan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. Selain itu, penggunaan dana sering tidak jelas, dan kurangnya pendampingan menyebabkan banyak usaha gagal memaksimalkan dana tersebut. Program pelatihan umumnya hanya fokus pada keterampilan teknis, seperti pembuatan produk kerajinan atau kuliner, tanpa memperhatikan aspek penting lainnya seperti manajemen usaha, pemasaran digital, dan branding. Kurangnya keterampilan manajerial dan pemasaran membuat produk sulit bersaing di pasar. Pelatihan sering bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan, padahal seharusnya terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis.” (Wawancara, 30 Agustus 2024).

Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi berbagai kendala terkait dengan ketersediaan dana dan bantuan teknis, yang berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa isu utama yang menghambat pengembangan ekonomi

kreatif di daerah ini adalah: - Kesulitan Akses Pembiayaan - Dana yang Terbatas dan Tidak Berkelanjutan - Kurangnya Fokus pada Inovasi Produk - Keterbatasan Pelatihan yang Relevan - Prosedur Pengajuan yang Rumit.

Kemitraan dengan lembaga atau komunitas lokal untuk mendukung program.

Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, serta komunitas lokal adalah faktor kunci dalam kesuksesan pengembangan ekonomi kreatif di suatu daerah. Namun, di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat kekurangan dalam kemitraan antara berbagai pihak yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: Dikatakan oleh Bapak Daut Marasabessy, (43 Tahun) Dosen Kebijakan pada Universitas Darussalam Ambon, bahwa :

“Program pemberdayaan ekonomi kreatif sering dijalankan oleh pemerintah tanpa melibatkan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kebutuhan dan karakteristik setempat. Komunitas lokal, seperti kelompok usaha mikro dan asosiasi kerajinan, memiliki wawasan mendalam tentang potensi dan kendala, namun sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keberhasilan program memerlukan partisipasi aktif mereka untuk masukan yang lebih relevan. Program sering dibuat secara top-down tanpa konsultasi cukup. Selain itu, lembaga pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah, seperti sekolah kejuruan dan universitas, belum cukup berperan dalam mendukung sektor ekonomi kreatif. Pendidikan dan pelatihan yang relevan penting untuk meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif, namun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sering kali terbatas, membuat pelatihan kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau pasar.” (Wawancara, 31 Oktober 2024).

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Daut Marasabessy, (43 Tahun) Dosen Kebijakan pada Universitas Darussalam Ambon, bahwa :

“Banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Maluku Tengah kesulitan mengakses pendanaan, pemasaran, dan jaringan distribusi yang luas. Meskipun sektor swasta penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui investasi dan akses pasar, keterlibatan sektor swasta di daerah ini masih minim. Pelaku usaha di wilayah pedesaan atau pesisir menghadapi hambatan untuk mengakses pasar yang lebih besar, dan kurangnya kemitraan dengan perusahaan atau lembaga memperlambat pengenalan produk mereka. Sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, dan e-commerce bisa menjadi mitra potensial, tetapi kemitraan ini belum optimal. Selain itu, kelompok usaha sering bekerja secara terpisah tanpa kolaborasi, yang mengurangi daya saing dan peluang bisnis baru. Kurangnya jaringan komunitas yang menghubungkan pelaku usaha membuat mereka bekerja dalam isolasi tanpa dukungan dari komunitas yang lebih besar.” (Wawancara, 31 Oktober 2024).

Dilanjutkan oleh Bapak J.A. Sitanala (59 Tahun) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, bahwa :

“Banyak pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah bekerja secara individual tanpa kolaborasi, menghambat perkembangan usaha karena tidak ada berbagi sumber daya, informasi, atau pengalaman. Kolaborasi antar kelompok usaha penting untuk meningkatkan kapasitas, pemasaran, dan akses pasar yang lebih luas, namun terbatasnya infrastruktur komunikasi dan transportasi antar daerah membuat kolaborasi sulit. Akses terbatas ke teknologi digital juga menjadi tantangan, menghalangi pelaku usaha memperkenalkan produk mereka ke pasar lebih luas. Informasi tentang hibah, pembiayaan, pelatihan, dan peluang pasar sering tidak tersedia atau sulit diakses, yang mengurangi daya saing produk lokal dan potensi pertumbuhan ekonomi. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.” (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal merupakan elemen kunci dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, ada sejumlah kendala yang menghambat terwujudnya kemitraan yang efektif, yang berujung pada terbatasnya potensi sektor ekonomi kreatif di daerah ini. Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah terhambat oleh kurangnya kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Kemitraan yang efektif akan membuka peluang baru untuk akses pasar, pendanaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan produk. Tanpa kemitraan yang kuat, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar global.

KESIMPULAN

Kemampuan Bappelitbangda dalam mengatur program pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek kunci: 1) Bappelitbangda melakukan pemetaan ekonomi masyarakat untuk mengidentifikasi sumber daya, keterampilan, pendidikan, dan infrastruktur, yang membantu merancang program sesuai kebutuhan lokal dan potensi daerah. 2) Bantuan disalurkan melalui jaringan lokal seperti kelompok usaha dan pemerintah desa, dengan pengawasan untuk memastikan penggunaan yang sesuai. 3) Partisipasi masyarakat diutamakan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan, serta pelatihan yang mencakup keterampilan teknis dan manajemen usaha. 4) Evaluasi berkala dan audit penggunaan dana dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Secara keseluruhan, Bappelitbangda menunjukkan kemampuan dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi kreatif dengan perencanaan berbasis data, distribusi bantuan tepat sasaran, partisipasi masyarakat aktif, serta pengawasan dan evaluasi untuk keberhasilan program yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat lokal dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah rendah karena beberapa faktor: 1) Kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat program akibat sosialisasi yang minim dan pendekatan yang tidak tepat. 2) Infrastruktur buruk, seperti jalan rusak, akses internet terbatas, dan pasar yang belum optimal, menghambat partisipasi. 3) Ketergantungan pada sektor tradisional dan kurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah sebelumnya membuat masyarakat ragu. 4) Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih fokus pada kebutuhan dasar daripada mengikuti program. 5) Program pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan budaya lokal, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan, menjadi kendala. 6) Kurangnya akses modal usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan juga menghambat partisipasi. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi kreatif.

Keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah terhambat oleh beberapa faktor utama: 1) Keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi buruk di wilayah pesisir dan pedesaan serta akses internet terbatas, menghambat distribusi produk dan pemasaran digital. 2) Akses pembiayaan yang sulit, dengan program yang sering tidak menjangkau wilayah terpencil atau memiliki persyaratan ketat. 3) Keterbatasan keterampilan dan pelatihan yang tidak relevan, fokus hanya pada keterampilan teknis tanpa aspek manajerial atau pemasaran. 4) Ketergantungan pada sektor tradisional dan kurangnya inovasi dalam diversifikasi produk. 5) Tantangan sosial dan budaya, di mana sebagian

masyarakat menolak sektor ini karena bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Semua faktor ini mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Penilaian dari pihak terkait (stakeholders) terhadap kurang efektifnya pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan beberapa isu dan tantangan yang menjadi hambatan utama dalam implementasi program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kelompok usaha lokal, dan masyarakat, berikut adalah beberapa aspek yang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut: - Kurangnya Sosialisasi dan Keterlibatan Stakeholders Lokal - Keterbatasan Infrastruktur - Ketidcocokan Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar - Akses Terbatas ke Pembiayaan - Ketergantungan pada Sektor Tradisional dan Resistensi terhadap Perubahan - Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Program - Kurangnya Dukungan dan Koordinasi Antar lembaga.

Adapun faktor penghambat yaitu banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi kesulitan dalam pengelolaan bisnis, seperti keuangan, perencanaan, dan pemasaran, yang menghambat keberlanjutan usaha mereka. Tanpa manajer yang berkompeten dalam bidang ini, banyak usaha yang stagnan atau gagal. Selain itu, kurangnya riset pasar dan pemahaman tren industri membuat produk lokal sulit bersaing di pasar global. Kualitas produk juga tidak konsisten karena keterbatasan keterampilan teknis. Keterbatasan akses ke teknologi dan internet menghambat pemasaran digital, yang sangat penting di era digital ini. Pengenalan teknologi dalam produksi dan pemasaran bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi berbagai kendala terkait dengan ketersediaan dana dan bantuan teknis, yang berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa isu utama yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif di daerah ini adalah: - Kesulitan Akses Pembiayaan - Dana yang Terbatas dan Tidak Berkelanjutan - Kurangnya Fokus pada Inovasi Produk - Keterbatasan Pelatihan yang Relevan - Prosedur Pengajuan yang Rumit.

Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal merupakan elemen kunci dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, ada sejumlah kendala yang menghambat terwujudnya kemitraan yang efektif, yang berujung pada terbatasnya potensi sektor ekonomi kreatif di daerah ini. Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah terhambat oleh kurangnya kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Kemitraan yang efektif akan membuka peluang baru untuk akses pasar, pendanaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan produk. Tanpa kemitraan yang kuat, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tengah akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2007). Program Penelitian. PT Rineka Putra. Jakarta.
- Basri, M. Chatib, dkk. (2012). Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan Perdagangan Indonesia, Cetakan Pertama. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Cahyani Muis, Afni Regita. (2019). *Ekonomi Kreatif Indonesia Dalam Dinamika Perdagangan Internasional*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Putra, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Ginting, A. M., Rivani, E., & Dkk. (2017) *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, 1 Ed. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses tgl 08 Mei 2024.
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moelyono, Mauled. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nawawi, I., Ruyadi, Y., & Komariah, S. (2015). Pengaruh keberadaan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa Lagadar. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2).
- Pangestu, Mari Elka. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* Departemen Perdagangan. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Ritonga, M.T. (2000). *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Suhartono, Tri Kurniawati R. M. Kholis, 2014. *Evaluasi Program*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sulistiyani. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Paramita. Surabaya.
- Tayibnaps, (2008). *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tiara Evarista, Tujuan Dan 7 Pengertian Ekonomi Kreatif Menurut Para Ahli, Di Akses Dari <https://Mridn.Com/Inilah-Tujuan-Dan-7-Pengertian-Ekonomi-Kreatif-Menurut-Para-Ahli/> Pada 29 Mei 2024 Pukul 10.00.
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.
- Wiratman, A, and T Tarman. (2021) "The Effect of The Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Learning Model on Students' Critical Thinking Abilities." *Proceedings International Education Webinar of IAIN Palopo (PROCEEDINGS IEWIP)*, 1 (1).